

Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat)

Ruslina Lisda¹⁾, Liza Laila Nurwulan²⁾, Lisna Septianisa³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan
Jalan Tamansari mau. 8 Bandung 022-4233646 / 022-4204363
e-mail: ruslina_lisda@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Desa di Kabupaten Bandung Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 41 Desa atau kelurahan di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Besarnya pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 36,5%, pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 15,7%, dan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 27,1%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Besarnya pengaruh secara simultan yaitu sebesar 79,3% dan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata kunci: SIMDA Desa, Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM, Kualitas Laporan Keuangan.

1. Pendahuluan

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam melaksanakan kegiatannya sebuah desa memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan pemerintah desa itu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Sesuai dengan Nomor 37 Tahun 2014 pasal 12 ayat 3 bagian pertama penatausahaan penerimaan,

yaitu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pemerintah desa wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangannya, khususnya dibidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. (Mardiasmo, 2004:35)

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Cipmawati Mohune, 2013). BPKP meluncurkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) sebagai bentuk perwujudan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa. SIMDA Desa dapat membantu para kepala desa dan perangkatnya, sehingga mereka tidak disibukkan pelaporan secara terus menerus melainkan dapat fokus pada program desa sehingga pembangunan dapat merata dan dapat diserap secara maksimal, tidak hanya pemerintah desa saja yang diuntungkan dengan adanya aplikasi ini, pemerintah kabupaten pun merasakan keuntungan adanya aplikasi ini yaitu pada setiap tahunnya pemkab hanya perlu mengunduh laporan yang ada di setiap desa. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dalam penyampaian laporan keuangan mapan laporan pertanggungjawaban pun menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Pengimplementasian SIMDA Desa sangat dibutuhkan membantu dalam proses pelaporan keuangan desa.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Ridwan, 2014) karena dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa akan membantu pemerintah mempercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Berdasarkan PP Nomor 192 Tahun 2014 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa adalah suatu aplikasi yang dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dan menghasilkan informasi keuangan desa yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada para *stakeholder*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Arens, 2008) karena SPIP menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Sudarmanto, 2009:12) karena dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Menurut Sutrisno (2010:3) Sumber Daya Manusia merupakan satu satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencaapi tujuan.

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju

dan berkembang, maka masyarakat harus turut berperan langsung dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang setiap tahun disalurkan pemerintah bertujuan untuk menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun penggunaan dana desa tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal untuk memperkaya diri sendiri. (Sherly Gresita Apriliani, 2014).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat secara parsial dan simultan

2. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah desa di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 165 Desa, dengan sampel sebanyak 41 desa/kelurahan dengan menggunakan sumber data primer sebagai sumber data penelitian yang berupa kuesioner kepada responden.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa di Kabupaten Bandung Barat Cukup Baik. Hal ini didukung oleh dimensi penelitian yaitu Akses, Portal Pelayanan Publik, Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, Infrastruktur dan Aplikasi Dasar.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas laporan keuangan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	-.121	.243		-.497	.622			
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa (X1)	.385	.097	.444	3.982	.000	.821	.548	.298
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X2)	.243	.097	.234	2.502	.017	.672	.380	.187
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X3)	.341	.110	.343	3.106	.004	.789	.455	.232

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Dari tabel 1 di atas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,121 + 0,385 X_1 + 0,243 X_2 + 0,341 X_3$$

Tabel 2. Korelasi Ganda
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.793	.776	.27189

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X3), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X2), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya korelasi antara Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM) dengan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,890 dan masuk dalam kategori sangat kuat.

Tabel 3. Hasil ANOVA (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.468	3	3.489	47.203	.000 ^b
Residual	2.735	37	.074		
Total	13.203	40			

a. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X3), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X2), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa (X1)

Tabel 3 menunjukkan bahwa F_{hitung} (47,203) lebih besar dari F_{tabel} (2,859) sehingga diperoleh keputusan bahwa secara simultan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Dari hasil pada tabel 2 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,793. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 79,3% dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempengaruhi Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.2 Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t_{hitung} untuk Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa = 3,982 lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,026) (lihat tabel 1) maka dapat diambil keputusan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Besarnya pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar $0,444 \times 0,821 = 0,365$ atau 36,5% (tabel 2)

3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Nilai t_{hitung} sebesar 2,502 lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,026) (lihat tabel 1) maka dapat diambil keputusan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar $0,234 \times 0,672 = 0,157$ atau 15,7% (tabel 2)

3.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Nilai t_{hitung} sebesar 3,106 lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,026) (tabel 1) maka dapat diambil keputusan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Besarnya Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar $0,343 \times 0,789 = 0,271$ atau 27,1%. (tabel 2)

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Desa di Kabupaten Bandung Barat, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa di Kabupaten Bandung Barat Cukup Baik. Hal ini didukung oleh dimensi penelitian yaitu Akses, Portal Pelayanan Publik, Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, Infrastruktur dan Aplikasi Dasar.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah Memadai. Hal ini didukung oleh dimensi penelitian yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berada pada kategori berkualitas. Hal ini didukung oleh dimensi penelitian yaitu Dorongan (Motives), Watak/Sifat (Traits), Konsep Diri (Self-Concept), Pengetahuan (Knowledge), dan Keterampilan (Skills).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sudah berkualitas. Hal ini didukung oleh dimensi penelitian yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami.

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar 36,5%.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar 15,7%.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat sebesar 27,1%.

3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 79,3% pada Desa di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), variabel stres kerja dan motivasi, serta variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kabupaten Bandung Barat, maka penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi dan peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya informasi yang dihasilkan SIMDA Desa mudah diakses oleh publik sehingga perlu adanya perbaikan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi pada komputer, menggunakan jaringan internet atau intranet secara optimal, serta mengoptimalkan akses sebagai media komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
2. Sebaiknya pemerintah desa melakukan analisis resiko atas program program kerja yang dilaksanakannya serta melakukan pembaharuan dan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem informasi yang ada.
3. Sebaiknya pegawai dapat manage pekerjaannya agar tidak terjadi penumpukan pekerjaannya yang mengakibatkan pegawai harus bekerja hingga larut malam, pegawai harus melaksanakan tugas dengan cekatan, serta pegawai harus mampu memecahkan permasalahan dengan baik dengan cara instansi mengadakan pelatihan untuk para pegawainya.
4. Sebaiknya informasi laporan keuangan yang disediakan lebih dioptimalkan secara sistematis dan teratur (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan) serta informasi yang disajikan harus secara wajar dan apa adanya yang sesuai dengan peristiwa sebenarnya.
5. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna untuk dijadikan landasan kesimpulan secara general pada Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk itu berkaitan dengan penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengambil topik yang sama dengan penulis agar dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambah variabel penelitian, populasi penelitian dan indikator kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi yang berbeda dan lebih baik dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan secara umum.

Daftar Pustaka

Buku

- [1] Arens. 2008. Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga
- [2] Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- [3] Bintarto, R. 2015. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [4] Halim, Abdul Syam Kusufi, Muhammad. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat
- [5] Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

- [6] Mathis, L.Robert and John J Jackson. 2008. Thomson Human Resource Management: Twelfth Edition. South-Western
- [7] Moehersono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia Indonesia
- [8] Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [9] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [10] Wibisono, Tri. 2010. Mencapai Tujuan Nasional Bersama SPIP dan Integritas & Etika Sebagai Pilihan. Warta Pengawasan, Volume XVII. BPKP
- [11] Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Salemba Empat

Peraturan Pemerintah

- [12] Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [13] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- [14] Peraturan Pemerintah No. 192 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah Desa
- [15] Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- [16] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [17] Permendagri no. 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa

Jurnal

- [18] Andini Kusuma Dewi. 2014. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).
- [19] Andriani wiwik, 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan).
- [20] Bayu Dharma Putra, 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus di Kota Padang).
- [21] Cipmawati Mohune, 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- [22] Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Ridwan, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.3 No.3
- [23] Herawati, 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).
- [24] I Made Edy Sutawan dkk, 2015. Pengaruh Stres Kerja, Motivasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi di Kabupaten Buleleng).
- [25] Rieska Widiani, 2013. Pengaruh Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada SD di Kecamatan Andir Kota Bandung).
- [26] Sherly Grestia Apriliani, 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- [27] Yan Herwan. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kecamatan Bintang Pesisir.